



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI V DPR RI

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2011 – 2012
Masa Sidang	: II
Rapat	: Ke - 6 (enam)
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Kamis, 1 Desember 2011
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.30 WIB s.d 20.50 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Penjelasan Pemerintah terkait upaya penyelamatan dan evakuasi korban akibat runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) di Provinsi Kalimantan Timur;2. Penyampaian hasil investigasi dan evaluasi sementara atas kejadian runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur;3. Penjelasan Pemerintah terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kondisi darurat untuk menggantikan fungsi Jembatan Mahakam II Kutai Kartanegara, dan langkah-langkah pemulihan alur angkutan sungai Mahakam;4. Penjelasan teknis sesuai dengan bidang masing-masing terkait peristiwa runtuhnya jembatan Kukar di Provinsi Kalimantan Timur.
Ketua Rapat	: Ir. H. Mulyadi
Sekretaris	: Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum, Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Kakorlantas Polri, Kepala Basarnas, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Kartanegara, Ketua DPRD Kutai Kartanegara, dan Direksi PT Hutama Karya, Direksi PT Perentjana Djaja, Direksi PT Bukaka Teknik Utama beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 14.30 WIB setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal pada hari ini adalah penjelasan Pemerintah terkait upaya penyelamatan dan evakuasi korban akibat runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) di Provinsi Kalimantan Timur; penyampaian hasil investigasi dan evaluasi sementara atas kejadian runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur; penjelasan Pemerintah terkait langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kondisi darurat untuk menggantikan fungsi Jembatan Kutai Kartanegara, dan langkah-langkah pemulihan alur angkutan sungai Mahakam; dan penjelasan teknis sesuai dengan bidang masing-masing terkait peristiwa runtuhnya jembatan Kukar di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan SAR Nasional, Bupati Kutai Kartanegara, Direksi PT. Perentjana Djaja, Direksi PT Utama Karya, Direksi PT. Bukaka Teknik Utama, Wakil Menteri Perhubungan, Wakil Kakorlantas Polri, dan Wakil Gubernur Kutai Kartanegara untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Komisi V DPR RI mendukung upaya-upaya Basarnas untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban yang sampai saat ini masih menemui beberapa kendala. Komisi V DPR RI juga meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membebaskan biaya perawatan serta memberikan santunan kepada masyarakat yang menjadi korban.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU untuk melakukan investigasi secara menyeluruh atas runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara dengan membentuk Tim Independen yang berasal dari para pakar bidang konstruksi khususnya konstruksi jembatan dari Perguruan Tinggi (antara lain ITB, ITS, UGM, UI), Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, dan Litbang PU serta menyampaikan hasilnya kepada Komisi V DPR paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja.
3. Guna menjamin aksesibilitas wilayah, Komisi V DPR RI mendukung langkah Kementerian Perhubungan untuk mengadakan sarana transportasi darurat untuk menggantikan sementara fungsi jembatan.
4. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk segera mengangkat reruntuhan jembatan agar Lalu Lintas dan Angkutan Sungai di Sungai Mahakam dapat dipulihkan secepatnya.
5. Untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa yang akan datang maka Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU untuk melakukan audit teknis terhadap jembatan dengan bentang panjang, terutama jembatan dengan sistem *Suspension* dan *Cable Stay*.

6. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menyelesaikan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bagi Pemeliharaan Jembatan dengan bentang panjang.
7. Komisi V DPR RI meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengoptimalkan Manajemen Lalu Lintas untuk meminimalisir gangguan terhadap mobilitas masyarakat.
8. Komisi V DPR RI mendukung *sharing* pendanaan melalui APBN untuk pembangunan kembali jembatan Kutai Kartanegara.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 20.50 WIB.

Jakarta, 1 Desember 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

WAKIL MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BAMBANG SUSANTONO

WAKIL KAKORLANTAS POLRI

ttd

DIDIK PURNOMO

KETUA RAPAT,

ttd

H. MULYADI

KEPALA BASARNAS,

ttd

DARYATMO

WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

FARID WADJDY